



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYADI ARITONANG
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 461711

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.005.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/320 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah Seluas 687 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
3. Tanah Seluas 87 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. Tanah Seluas 9.489 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di DELI SERDANG,
HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 391 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
7. Tanah Seluas 88 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000
8. Bangunan Seluas 45 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/23 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 192.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2 PK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 140.450.927

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.337.450.927

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.337.450.927

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.